

Nama : Diah Arum Sari Nawang Ulan

NPM : 2313031021

Kelas : 2023A

Matkul : Ekonomi Pendidikan

“Reformasi Pembiayaan Pendidikan di Provinsi Nusantara Raya”

Pendahuluan

Pendidikan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pembangunan suatu daerah, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Pemerintah Provinsi Nusantara Raya sebenarnya sudah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 22% dari APBD, yang bisa dibilang cukup besar. Namun, pada kenyataannya, kualitas pendidikan di daerah tersebut masih belum optimal. Hal ini terlihat dari rendahnya kemampuan literasi dan numerasi siswa, adanya kesenjangan yang cukup tinggi antara sekolah di kota dan desa, serta belum meratanya distribusi guru dan fasilitas pendidikan, khususnya infrastruktur digital.

Gambaran Data Pembiayaan Pendidikan

Tabel 1. Struktur Anggaran Pendidikan

Komponen Pengeluaran	Persentase
Gaji & Tunjangan Guru	68%
Infrastruktur	12%
Bantuan Siswa	8%
Administrasi & Lainnya	12%
Total	100%

Tabel 2. Permasalahan Pendidikan yang Dihadapi

Aspek	Kondisi Saat Ini
Literasi & Numerasi	Di bawah rata-rata nasional
Kesenjangan Pendidikan	Tinggi (kota vs desa)
Distribusi Guru	Tidak merata

Infrastruktur Digital	Sangat terbatas
-----------------------	-----------------

Pembahasan

1. Analisis Struktur Pengeluaran

Jika dilihat dari tabel di atas, sebagian besar anggaran pendidikan masih difokuskan pada gaji dan tunjangan guru, yaitu sebesar 68%. Kondisi ini menunjukkan bahwa belanja pendidikan masih berorientasi pada biaya rutin, bukan pada peningkatan kualitas. Sementara itu, alokasi untuk infrastruktur dan bantuan siswa masih tergolong rendah, padahal kedua aspek tersebut sangat penting untuk meningkatkan pemerataan pendidikan.

Selain itu, anggaran administrasi yang mencapai 12% juga masih bisa dioptimalkan dengan memanfaatkan teknologi digital agar lebih efisien. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian alokasi anggaran agar lebih seimbang dan berorientasi pada hasil.

2. Analisis Sumber Pembiayaan

Pembiayaan pendidikan saat ini masih bergantung pada APBD, sehingga ruang pengembangan menjadi terbatas. Untuk itu, perlu adanya alternatif pembiayaan dengan melibatkan pihak swasta melalui kerja sama (PPP), pemanfaatan CSR, serta pengembangan dana abadi pendidikan. Dengan adanya variasi sumber dana, program pendidikan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

3. Perbandingan dengan Negara OECD

Beberapa praktik dari negara OECD yang dapat diadopsi antara lain anggaran berbasis kinerja, alokasi dana berdasarkan kebutuhan siswa, peningkatan kualitas guru, serta penggunaan sistem berbasis data. Namun, dalam penerapannya perlu disesuaikan dengan kondisi Indonesia, terutama terkait kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia.

4. Rancangan Reformasi 5 Tahun

Tabel 3. Rencana Perubahan Struktur Anggaran

Komponen Pengeluaran	Saat Ini	Target 5 Tahun
Gaji Guru	68%	55%
Infrastruktur	12%	20%
Bantuan Siswa	8%	15%
Administrasi	12%	10%

Reformasi ini akan didukung dengan peningkatan kualitas guru melalui pelatihan dan redistribusi, pengembangan digitalisasi sekolah, serta penerapan sistem monitoring berbasis data untuk memastikan efektivitas kebijakan.